



ANALISAPENGARUH KINERJA PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA DEPOK

Ismail

ismailmanas67@yahoo.co.id

Dosen STIE Bisnis Indonesia Jakarta.

Abstract: *This research aimed to observe and analyze how far to earning performance of region-generated revenue and evaluated whatever factors influenced the earning performance itself. Data used is secondary data gathered since 2007-2013. Secondary data gathered by doing literature review which was taken from official data of local repertory agency, BPS, and BAPPEDA Depok. Data itself revolves around target and realization of region's tax earning, region's tax income, region generated revenue, PDRB and social –economic condition in Depok. Based on research results can be concluded that tax effort count (tax ratio) which is ratio between region' tax income and PDRB whitin 2007-2013 has increased with average of 0,00943 or 0,9 % each year. While effectivity of tax collection which observed from ratio between realization of region's tax earnings and regions tax income target is 113,11 % in average. As for efficiency that shows ratio between regions tax collection cost and realization of region tax earning averagely 10,97 %. From calculation result shows above it indicates that earning performance of region - generated revenue measured using tax effort level, tax effectivity and tax efficiency has shown positive feedbacks, there tendency of yearly increasing tax income for the upcoming future.*

Keywords: *Local Original Revenue Performance, Tax Efficiency, Tax Effectiveness and Tax Efforts*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menganalisa sejauh mana kinerja Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menilai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dari kinerja Penerimaan PAD tersebut. Data yang digunakan adalah data sekunder semenjak tahun 2007-2013. Data sekunder diperoleh dengan melakukan study pustaka yang diambil dari data resmi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Depok, BPS Kota Depok dan BAPPEDA Kota Depok yang meliputi data target dan realisasi penerimaan pajak daerah, pajak daerah, PAD, PDRB dan data kondisi sosial ekonomi Kota Depok. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh data bahwa perhitungan Upaya Pajak (Tax Ratio) yang merupakan rasio antara penerimaan pajak daerah dengan PDRB, selama tahun 2007-2013 mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 0,00943 atau 0,9 % pertahun. Sedangkan efektivitas pemungutan pajak daerah yang dilihat dari rasio antara penerimaan pajak daerah dengan target penerimaan pajak daerah rata-rata sebesar 113,11 % pertahun. Adapun efisiensi pajak yang menunjukkan rasio antara biaya pungut pajak daerah dengan realisasi penerimaan pajak daerah rata-rata 10,97 % pertahun. Dari hasil perhitungan diatas menunjukkan bahwa kinerja PAD yng diukur dengan tingkat upaya pajak, efektivitas pajak dan efisiensi pajak sudah menunjukkan arah yang positif sehingga ada kecenderungan terjadinya peningkatan penerimaan pajak daerah dari tahun ke tahun untuk masa yang akan datang.

Kata Kunci: Kinerja Pendapatan Asli Daerah, Efisiensi Pajak, Efektivitas Pajak dan Upaya Pajak.

Pendahuluan

Undang-undang Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola pembangunan sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Pada dasarnya pembangunan berkaitan dengan 3 (tiga) proses yaitu perencanaan, pemrograman dan penganggaran. Kemampuan dalam mengelola keuangan daerah tergantung kepada perencanaan dan pemrograman yang harus dilakukan dengan desentralisasi fiskal. Pemerintah daerah telah diberi kewenangan untuk mengelola berbagai sumber keuangan baik dari lokasi pemerintah maupun dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator untuk mengukur kemampuan dan kemandirian keuangan suatu daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Tingkat Kemandirian Keuangan suatu daerah dapat dilihat dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Penerimaan Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Semakin tinggi proporsi PAD terhadap Penerimaan Daerah dalam APBD, semakin baik tingkat kemandirian keuangannya dan semakin besar kemampuan keuangan suatu daerah untuk membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan

Kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat diarahkan kepada pengembangan kapasitas sumber daya (*Resources*). Oleh sebab itu penilaian terhadap keadaan sekarang (*existing condition*) merupakan langkah utama guna menentukan sektor-sektor yang potensial untuk dikembangkan secara optimal. Undang-undang No, 22 dan 25 Tahun 1999 memberikan peluang kepada daerah untuk menggali potensi sumber-sumber penerimaan daerah, jika dibandingkan dengan aturan sebelumnya yang lebih banyak memberikan keleluasaan kepada pemerintah di atasnya. Secara umum Undang-undang ini memberikan keleluasaan kepada daerah dalam melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber penerimaan.

Penyelenggaraan pemerintah di Kota Depok memerlukan dana untuk pembiayaan pembangunan. Dana pembangunan untuk pelaksanaan otonomi daerah itu dapat diperoleh dari sumber pendapatan daerah. Sumber pendapatan daerah menurut undang-undang no 32 tahun 2004 terdiri atas : pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus) dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pengelolaan pendapatan daerah ditujukan pada upaya-upaya strategis dalam peningkatan penerimaan keuangan daerah dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan administrasi, sumber daya manusia dan kreativitas para anggota MUSPIKO dalam mengelola sumber utama keuangan daerah.

Landasan Teori

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang terdiri dari:

a. Hasil Pajak Daerah

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Pasal 1 UU No. 34 tahun 2000). Penentuan tarif dan tata cara pemungutan pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA) sesuai perundang-undangan yang berlaku.

b. Hasil Retribusi Daerah

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sebagaimana Pajak Daerah, penentuan tarif dan tata cara pemungutan retribusi daerah juga ditetapkan berdasarkan PERDA yang sesuai dengan perundang-undang yang berlaku.

- c. Hasil Perusahaan Milik Daerah.
- d. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
- e. Sumber-Sumber Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
Sumber-Sumber Lain PAD yang sah antara lain bersumber dari hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro.

Pajak daerah

Brotodiharjo (1987:2) menjelaskan bahwa Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang tentang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah. Menurut UU. No.8 tahun 1997 memberikan definisi sebagai berikut :Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan daerah tanpa imbalan yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pengukuran Kinerja Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang telah direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi (Hamzah, 2008). Indikator kinerja yang dipergunakan di dalam mengukur kinerja organisasi yaitu :

1. Masukan (*Input*) yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa sumber dana, sumber daya manusia, material, waktu, teknologi dan lain sebagainya yang digunakan untuk melaksanakan program dan atau kegiatan.
2. Keluaran (*Output*) adalah tolak ukur kinerja berdasarkan produk /barang dan jasa yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan masukan yang digunakan.
3. Hasil (*Outcome*) adalah tolak ukur kinerja berdasarkan tingkat keberhasilan yang dapat dicapai berdasarkan keluaran program atau kegiatan yang sudah dihasilkan.
4. Manfaat (*Benefit*) adalah tolak ukur kinerja berdasarkan tingkat kemanfaatan yang dapat dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat dan pemerintah daerah.
5. Dampak (*Impact*) adalah tolak ukur kinerja berdasarkan dampaknya terhadap kondisi makro yang ingin dicapai dari manfaat (Fadillah dan Muhtar, 2004:32).

Menurut Bastian (2001 : 329) menyatakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi dalam perumusan strategis organisasi.

Upaya Pajak

Memberikan penilaian terhadap keberhasilan suatu pajak mutlak harus dilakukan, karena penilaian tersebut akan diketahui seberapa jauh pajak tersebut dapat menghimpun partisipasi masyarakat dan seberapa jauh pula pajak itu mampu memberikan kontribusi kepada pelaksanaan pembangunan . Upaya Pajak/*Tax Effort* menunjukkan perbandingan antara hasil suatu sistem pajak dengan

kemampuan bayar pajak suatu daerah. Kemampuan bayarpajak suatu daerah lazim diukur dengan *Produk Domestik Regional Bruto*(PDRB). Upaya Pajak merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahuihasil suatu sistem pajak dibandingkan dengan kemampuan bayar pajak daerahyang bersangkutan. pengukur kemampuan bayar pajak yang biasa digunakanadalah PDRB. Jika PDRB meningkat maka kemampuan wajib pajak daerahdalam membayar pajak akan meningkat demikian pula sebaliknya (LaluKaryawan, 2002: 23)

Efisiensi Pajak

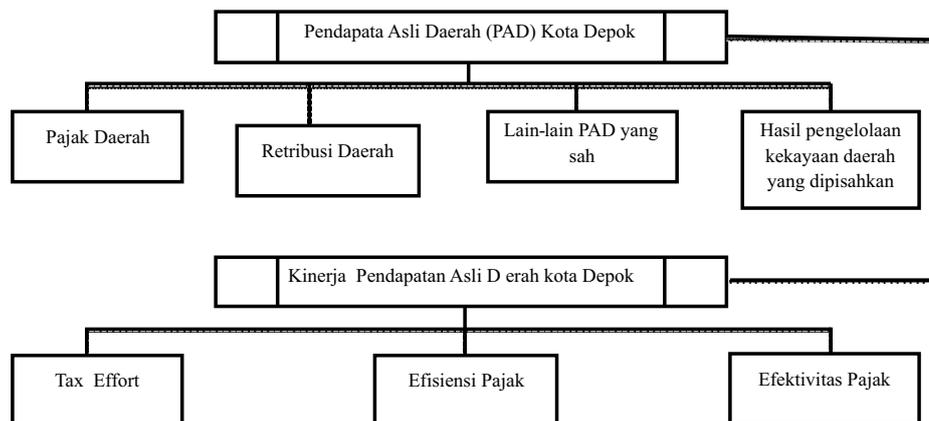
Merupakan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk memperolehsuatu jenis pendapatan dengan realisasi penerimaannya. Efisiensi merupakan perbandingan output dengan input yang dikaitkan dengan standar kinerja/targetyang ditetapkan, jadi efisiensi merupakan rasio terbaik antara output dengan biaya (*input*). Penghitungan efisiensi dimaksudkan untuk mengukurperbandingan antara biaya dengan realisasi yang diperoleh. Efisiensi dikatakanlebih baik apabila perbandingan biaya dengan realisasi yang telah dicapainilainya semakin kecil (Abdul Halim, 2007: 74). Tingkat efisiensi Pajak Daerah dihitung dengan menggunakan data biaya yang dikeluarkan yang terkaitdengan biaya pemungutan Pajak Daerah yang terdiri biaya Upah Pungut dan biaya operasional.

Efektifitas Pajak

Merupakan perbandingan antara realisasi suatu pendapatan dengan targetyang ditetapkan. Dengan kata lain efektivitas berarti tingkat pencapaian hasilprogram kerja dengan target yang ditetapkan, juga bisa dikatakan merupakan perbandingan antara *outcome* dengan *output*. *Outcome* adalah tujuan/targetyang ditetapkan (Abdul Halim, 2007: 75).

Kerangka Pikir

Gambar 2.1.
Kerangka Pemikiran studi



Hipotesis

Berdasarkan dari latar belakang masalah, tujuan penelitian dan landasan teori serta penelitian-penelitian sebelumnya, maka hipotesis dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Didugat ada hubungan dan pengaruh antara upaya pajak (Tax Ratio), efektivitas pajak dan Efisiensi secara bersama sama (simultan) terhadap Kinerja pendapatan asli daerah (PAD) di daerah Kota Depok.
- b. Diduga ada hubungan dan pengaruh Upaya Pajak, secara parsial dengan Kinerja

- pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Depok
- c. Diduga ada hubungan dan pengaruh, Efektivitas Pajak secara parsial dengan Kinerja pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Depok
 - d. Diduga ada hubungan dan pengaruh Efisiensi Pajak secara parsial dengan Kinerja pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Depok

Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kota Depok adalah metode analisis Deskriptif Kuantitatif, dengan menggunakan data sekunder.

Jenis Data

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan pihak lain (Mudrajat Kuncoro 2003 : 127). Data sekunder yang digunakan antara lain adalah realisasi penerimaan pajak dari tahun 2007-2013 dan pengeluaran rutin DISPENDA Kota Depok. Kemudian data lain yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah kondisi perekonomian Kota Depok dari tahun ke tahun, semuanya diperoleh dari Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Depok, Badan Perencanaan Daerah Kota Depok, Kantor BPS Kota Depok, Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat dan Kota Depok dan Instansi lain yang terkait.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah Kualitas Subjek penelitian yaitu Kinerja Pengelolaan Pajak Daerah Kota Depok yang meliputi Target, Realisasi dan Biaya Pemungutan Pajak Kota Depok. Dalam penelitian ini tidak mengambil sampel dari seluruh populasi. Objek dari penelitian ini adalah Kinerja Pengelolaan Pajak Kota Depok Tahun 2007-2013. Oleh karena itu penelitian hanya ditujukan kepada analisis kinerja pengelolaan pajak pendapatan asli daerah di Kota Depok, yang dapat mewakili Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari beberapa instansi terkait atau dinas yang berkaitan langsung dengan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber data meliputi :

1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Depok Tahun 2007 -2013
2. Realisasi Penerimaan PAD Kota Depok Tahun 2007-2013
3. Target Pendapatan Pajak Daerah Kota Depok Tahun 2007-2013
4. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kota Depok Tahun 2007-2013
5. Biaya Pemungutan Pajak Daerah Kota Depok Tahun 2007-2013

Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berdasarkan dari informasi pihak lain yang dianggap relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode Dokumentasi dan Kepustakaan.

Teknik Analisis Data

Metode analisis digunakan untuk menguji dan untuk mendapatkan hasil dari penelitian yaitu menggunakan analisis regresi linier berganda *Multiple Regression Analysis* dengan pengujian data dibantu program *Statistical Product and Service Solution* (SPSS). Analisis ini dimaksudkan untuk mengungkapkan pengaruh antara beberapa variabel bebas dengan variabel terikat yang sudah menjadi variabel pilihan yang akan diteliti. Dengan dukungan pengujian yaitu:

1. Uji Asumsi Klasik

- a. Uji Normalitas, data pada penelitian yaitu menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*.
- b. Uji Multikolonieritas, bertujuan menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Pengujian ini akan dilakukan dengan uji *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)* terhadap setiap variabel independen.
- c. Uji Autokorelasi, untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi menggunakan uji *Durbin Wtson (DW test)* dan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi.
- d. Uji Heteroskedastisitas, bertujuan untuk menguji apakah dalam penelitian ini terdapat gejala heteroskedastisitas.

2. Uji Hipotesis

- a. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t), uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
- b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F), uji F diperlukan untuk menilai apakah model penelitian layak atau tidak untuk digunakan dan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen.

3. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2), uji (R2) yakni untuk mengukur atau menerangkan suatu model variasi yaitu variabel dependen.

4. Analisis Regresi Linear Berganda, uji ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kedua variabel independent (X) secara simultan dengan variabel dependen (Y).

Analisa dan Pembahasan

Tabel 4.1.
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kinerja	7	42.97	79.94	60.0071	15.97459
Efisiensi	7	5.30	24.00	10.9714	7.97051
Efektifitas	7	105.32	124.31	113.1071	6.69201
UpayaPajak	7	.39	1.96	.9429	.72161
Valid N (listwise)	7				

Menurut hasil pengamatan data dengan sampel selama 7 tahun diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Variabel Terikat (Kinerja PAD)

Rata kinerja 60,0071 dengan interval minimum sebesar 42,97 dan maximum 79,94 dengan tingkat standar deviasi 15.97459 .berarti bias antara data sesungguhnya dengan data rata-rata sebesar 15,97459.

2. Variabel Bebas.

a. Upaya Pajak

Nilai Rata-rata Upaya Pajak Daerah sebesar 0,9429 dengan interval minimum 0,39 dan maximum sebesar 0,9429 dengan standar deviasi 0,72161 yang berarti bias antara data yang sesungguhnya dengan data rata-rata sebesar 0,72161.

b. Efektivitas Pajak

Rata-rata nilai efektivitas Pajak daerah sebesar 113.1071 dengan interval minimum 105,32 dan maximum sebesar 124,31 dengan standar deviasi 6.69201 yang berarti bias antara data yang sesungguhnya dengan data rata-rata sebesar 6,69201

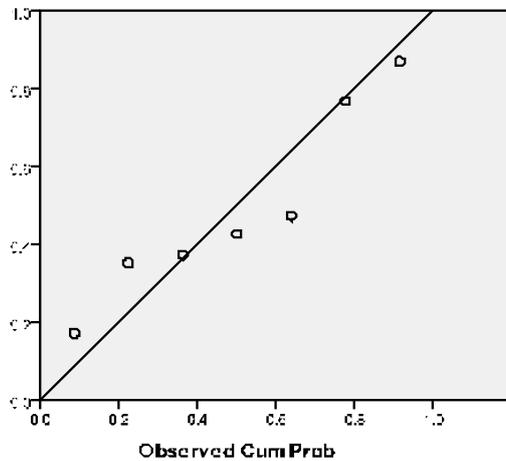
c. Efisiensi Pajak

Rata-rata efisiensi pajak daerah sebesar 10.9714 dengan interval minimum sebesar 5,30 dan interval maximum 24,00 dengan standar deviasi 7.97051 artinya bias antara data yang sesungguhnya dengan data rata-rata sebesar 7,97051.

Uji Normalitas.

Uji Normalitas dilakukan dengan melihat Normal Probability Plot. Analisa ini untuk menguji apakah data sebuah model regresi, variabel terikat, variabel bebas atau keduanya mempunyai distribusi normal atau mendekati normal. Adapun hasil analisis Uji Normalitas adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1
Grafik Normal P-P Plot
Dependent Variable: Kinerja



Hasil pengujian menunjukkan bahwa data data Residual secara normal dimana titik disekitar garis diagonal dan penyebarannya masih masih mengikuti garis diagonal. Kesimpulan karena mendekati garis tren, terbaca standar error data yang diperoleh sangat rendah dan dapat disimpulkan tingkat kesalahan data relatif kecil (valid), artinya data yang dipeoleh terukur. Menunjukkan kekuatan model Semakin dekat titik ke garis maka residual samakin kecil tingkat akurasi model samakin baik.

Uji Multikolinertas

Tabel. 4.2
Uii Multikolinertitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Efisiensi	.615	1.625
Efektifitas	.689	1.450
UpayaPajak	.672	1.488

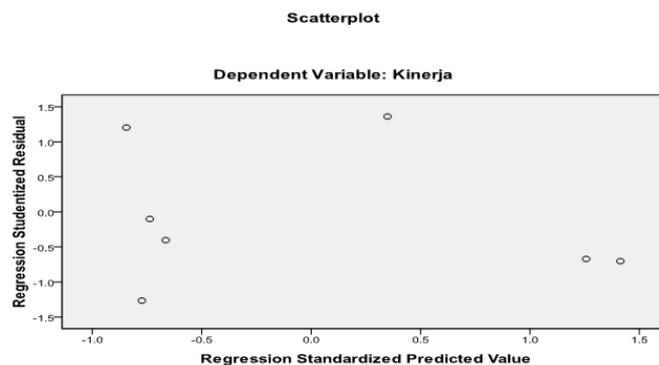
Sumber: data diolah, SPSS 21

Dari tabel diatas ini terlihat bahwa nilai *tolerance* mendekati angka 1 dan nilai *VarianceInflation Factor (VIF)* disekitar angka 1 disetiap variabel, yang ditunjukkan dengan nilai *tolerance* Efisiensi Pajak sebesar 0,615, Efektif Pajak sebesar 0,689 dan Upaya Pajak sebesar 0,672. Suatu model regresi dikatakan bebas dari problem Multikolinieritas apabila memiliki VIF kurang dari 10. Berdasarkan data ini dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi tidak terdapat problem multikolinieritas dan dapat digunakan dalam penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil pengolahan data Heteroskedastisitas hasilnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 4.2.
Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Scatterplot



Sumber: data diolah, SPSS 21

Dari gambar Output SPSS diatas tidak terdapat pola tertentu serta titik – titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka model regresi berganda tidak terdapat atau terbebas dari Heteroskedastisitas dan residualnya Homoskedastisitas. Scatter plot : sebaran residual dari model yang menunjukkan variansi dari model . Kalau tersebar dimana mana artinya residual terbebas dari hetero atau variannya relatif sama , kalau membentuk pola tertentu berarti ada kasus hetero artinya variannya tidak sama . varian dari satu pengamatan yang satu dengan yang lain tidak sama.

Uji Regresi Berganda.

Uji regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas yaitu Upaya Pajak, Efisiensi Pajak dan Efektivitas Pajak terhadap variabel terikat Kinerja Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 4.3
Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	15.390	45.528		.338	.758		
	Efisiensi	-.043	.350	-.021	-.122	.911	.615	1.625
	Efektifitas	.230	.393	.096	.585	.599	.689	1.450
	UpayaPajak	20.193	3.695	.912	5.465	.012	.672	1.488

Sumber: data diolah, SPSS 21

Dari tabel diatas diperoleh persamaan regresi berganda atau multiple regression.

$$Y = 15,390 - 0,043 X_1 + 0,230 X_2 + 20,193 X_3$$

Parameter plus menunjukkan hubungan positif (lurus) sedangkan parameter negatif menunjukkan hubungan yang terbalik. Didalam persamaan regresi berganda diatas diperoleh parameter negatif efisiensi dengan kinerja artinya hubungan antara efisiensi dengan kinerja berbanding terbalik. Ukuran efisiensi adalah biaya (cost), sedangkan ukuran kinerja adalah hasil yang diperoleh dari pemungutan pajak. Oleh karena itu semakin rendah biaya artinya efisien dan sebaliknya. Dengan biaya yang semakin rendah diperoleh kinerja yang semakin tinggi.

Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk melihat kemampuan model dalam menjelaskan variabel independen terhadap variabel dependen dari model yang dibangun.

Tabel 4.4.
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.972 ^a	.944	.888	5.35319	2.698

a. Predictors: (Constant), UpayaPajak, Efektifitas, Efisiensi

b. Dependent Variable: Kinerja .

Sumber: data diolah, SPSS 21

Dari hasil Output SPSS diperoleh Koefisien korelasi (R) sebesar 97,2 % yang termasuk kategori sangat kuat , ini berarti terdapat hubungan yang sangat kuat antara Upaya Pajak, Efisiensi Pajak dan Efektivitas Pajak terhadap Kinerja Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan besarnya Adjusted R Square 0,888 atau sebesar 88,8%. Hal ini berarti variasi komponen variabel bebas(efisiensi, efektivitas dan upaya pajak) secara total dapat mempengaruhi Kinerja PAD Kota Depok sebesar 88.8 % sedangkan sisanya 11,2 % dipengaruhi faktor lainnya dan dianggap ceteris paribus.

Uji Hipotesis

Uji t.

Uji t digunakan untuk menguji apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara terpisah.

Tabel 4.5
Uji t
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	15.390	45.528		.338	.758		
	Efisiensi	-.043	.350	-.021	-.122	.911	.615	1.625
	Efektifitas	.230	.393	.096	.585	.599	.689	1.450
	UpayaPajak	20.193	3.695	.912	5.465	.012	.672	1.488

Sumber: data diolah, SPSS 21

Sedangkan Uji Signifikansi parameter variabel PAD (Uji t Statistik) bahwa komponen independen variabel Efisiensi Pajak memberikan koefisien parameter sebesar - 0,043 dengan signifikan 0,911 lebih besar dari 0,05 dan efektivitas pajak 0,230 dengan signifikan 0,599 lebih besar dari 0,05 juga Upaya Pajak memberikan koefisien parameter sebesar 20,193 dengan tingkat signifikan 0,012 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas efisiensi pajak dan efektivitas pajak daerah tidak mempengaruhi kinerja PAD, sedangkan Upaya Pajak mempengaruhi Kinerja PAD Kota Depok.

Uji F

Uji F digunakan untuk menguji apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama. Anova atau analisis of variance adalah tergolong analisis komperatif lebih dari dua variabel bebas.

Tabel 4.6
Uji F
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1445.156	3	481.719	16.810	.022 ^a
	Residual	85.970	3	28.657		
	Total	1531.126	6			

a. Predictors: (Constant), UpayaPajak, Efektifitas, Efisiensi

b. Dependent Variable: Kinerja

Berdasarkan tabel 4.6. Anova ternyata didapat F hitung adalah 16,810 dengan tingkat signifikan 0,022. Untuk membuktikan apakah pengujian ini signifikan atau tidak digunakan Uji F. Uji Anova atau F. Test menghasilkan nilai F hitung sebesar 16.810 dengan tingkat signifikan 0,022, karena probabilitas signifikan jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel kinerja PAD atau dapat dikatakan bahwa variabel independen bersama-sama mempengaruhi Kinerja PAD Kota Depok.

Pembahasan Hasil Penelitian.

1. Pengaruh Efisiensi Pajak terhadap Kinerja Pendapatan Asli Daerah.
Berdasarkan tabel 4.6. dapat diketahui bahwa Efisiensi Pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat dilihat dari t hitung sebesar - 0,043 dengan signifikan 0,911 lebih besar dari 0,05, maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti Efisiensi Pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pendapatan Asli Daerah.
2. Pengaruh Efektivitas Pajak terhadap Kinerja Pendapatan Asli Daerah. Kota Depok
Berdasarkan tabel 4.6. dapat diketahui bahwa Efektivitas Pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat dilihat dari t hitung sebesar 0,230 dengan signifikan 0,599 lebih besar dari 0,05, maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti bahwa Efektivitas Pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pendapatan Asli Daerah Kota Depok.
3. Pengaruh Upaya Pajak terhadap Kinerja Pendapatan Asli Daerah.
Berdasarkan tabel 4.6. dapat diketahui bahwa Upaya Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat diketahui dari t hitung sebesar 20,193 dengan tingkat signifikan 0,012 lebih kecil dari 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel Upaya Pajak terhadap Kinerja Pajak Daerah Kota Depok.

4. Pengaruh Upaya Pajak, Efisiensi Pajak dan Efektivitas Pajak secara bersama-sama terhadap Kinerja Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan tabel 4.6. diketahui bahwa Upaya Pajak, Efisiensi Pajak dan Efektivitas Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil pengujian secara simultan F hitung 16.810 dengan tingkat signifikan 0.022 jauh lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa variabel independen yaitu Upaya Pajak, Efisiensi Pajak dan Efektivitas Pajak bersama-sama mempengaruhi Kinerja Pendapatan Asli Daerah Kota Depok. Besarnya nilai korelasi (R) sebesar 97,2 % yang berarti menunjukkan hubungan/korelasi yang sangat kuat antara Upaya Pajak, Efisiensi Pajak dan Efektivitas Pajak terhadap Kinerja Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan besarnya nilai *Adjusted R Square* 0,888 atau sebesar 88,8%. Hal ini berarti variabel bebas (efisiensi, efektivitas dan upaya pajak) secara total dapat mempengaruhi Kinerja PAD Kota Depok sebesar 88,8 % sedangkan sisanya 11,2 % dipengaruhi faktor lainnya dan dianggap *ceteris paribus*.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan.

1. Hasil uji secara parsial nilai probabilitas sebesar $0,911 > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel Efisiensi Pajak terhadap Kinerja PAD Kota Depok.
2. Hasil uji secara parsial nilai probabilitas sebesar $0,599 > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel Efektif Pajak terhadap Kinerja PAD Kota Depok.
3. Hasil uji secara parsial nilai probabilitas sebesar $0,12 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel Upaya Pajak terhadap Kinerja PAD Kota Depok.
4. Hasil uji nilai probabilitas dengan signifikan $0,022 < 0,05$ maka berarti variabel Efisiensi Pajak, Efektivitas Pajak dan Upaya Pajak bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja PAD Kota Depok. Berdasarkan uji nilai Korelasi *Adjusted R Square* diperoleh nilai sebesar 88,8 % . Hal ini berarti kontribusi variabel Efisiensi Pajak, Efektivitas Pajak dan Upaya Pajak terhadap Kinerja Pajak sebesar 88,8 % . Sedangkan sisanya 11,2 % dipengaruhi faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Saran

1. Perlu peningkatan Upaya Pajak dengan cara internal dan eksternal. Secara internal dilakukan dengan melakukan penegakan disiplin dan pengawasan melekat terhadap petugas pungut DPPKAD yang tidak tepat waktu dalam menyetorkan hasil pemungutan Pajak Daerah. Insentif perlu ditingkatkan agar petugas pungut lebih giat dalam mencapai target. Secara eksternal dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Daerah. Intensifikasi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap pegawai pemungut pajak dan melakukan sosialisasi Pajak Daerah terhadap wajib pajak dan melakukan penagihan pajak terutang secara lebih giat. Ekstensifikasi dapat dilakukan dengan melakukan pendataan secara rutin untuk menjangkau obyek pajak baru.
2. Dari hasil perhitungan efisiensi diketahui bahwa tingkat efisiensi pemungutan Pajak Daerah rata-rata sebesar 10,97 persen. Nilai ini dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dan sekaligus mengurangi biaya-biaya yang tidak berkaitan dengan

pemungutan pajak seperti biaya perjalanan dinas pejabat serta biaya makan minum rapat. Untuk mengurangi tingkat kebocoran pajak, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah perlu bekerja sama dengan instansi lain diantaranya dengan Dinas Pariwisata dan Kantor Satpol Pamong Praja untuk menindak secara tegas terhadap wajib pajak yang melakukan kolusi dengan petugas pungut untuk mengurangi beban pajak, Wajib Pajak Daerah yang lalai membayar pajak serta melakukan pembukuan ganda (*double accounting*) atau tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuannya. Dari perhitungan efektivitas berdasarkan rasio realisasi pajak dengan target pajak sudah berjalan secara efektif namun pada tahun-tahun mendatang . perlu adanya peningkatan target penerimaan pajak yang lebih besar lagi agar realisasi penerimaan pajak daerah juga dapat ditingkatkan. Untuk itu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Depok perlu mengintensifkan penerimaan Pajak Daerah dengan cara melakukan uji petik secara berkala di masing-masing obyek Pajak Daerah yang sudah terdaftar serta melakukan pendataan ulang.

Daftar Pustaka

- Arsyad, Lincoln. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yogyakarta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotamadya Depok. 2014. *Depok Dalam Angka*.
- Badan Pusat Statistik Kota Depok. 2014. *Kota Depok Dalam Angka*.
- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi sektor Publik di Indonesia, BPFE*. Jogjakarta.
- Davey. 1988. *Pembiayaan Pemerintah Daerah, Praktek-Praktek Internasional Dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga*. Jakarta. Universitas Indonesia (UI-press)
- Devas, Nick., Brian Binder, Anne Booth, Kenneth Davey and Roy Kelly. 1989. *Keuangan Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia.
- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Depok. 2014. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok*.
- Halim., Abdul. 2007. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah: Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Kedua. Cetakan Pertama. Yogyakarta. Penerbit UPP AMPYKPN.
- Hamzah Ardi. 2008. *Analisa Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur periode 2001-2006*. Universitas Trunojoyo .
- Lalu, Karyawan. 2002. *Efisiensi, Efektivitas dan Elastisitas Pajak Hotel dan Restoran di Kota Mataram Nusa Tenggara Barat*. Thesis S2 Program Pasca Sarjana MEP UGM. Yogyakarta (tidak dipublikasikan)
- Mardiasmo dan Akhmad Makhfatih. 2000. *Perhitungan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Magelang*. Laporan Penelitian, PAU Studi Ekonomi UGM. Yogyakarta (tidak dipublikasikan)
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi Daerah sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mudrajad Kuncoro. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta. Penerbit Erlangga.
- Nurlan Darise. 2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Cetakan Kedua. Jakarta. Penerbit PT. Indek.
- Sunarto, Ridwan. 2007. *Pengantar Statistika*. Cetakan Pertama Bandung. Penerbit Alfabeta
- Todaro, Michael. 2000. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi ke 6. Erlangga. Jakarta.
- Usman. 2010. *Analisa Perkembangan Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo*.